

Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Otoritas Keagamaan: Studi Komparatif tentang Ustadzah AI di Indonesia dan Robot Buddhis di Jepang

Muharis

Institut Studi Al Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran, Indonesia, muharis.mhum@gmail.com

Ernawati

Universitas Islam Mulia Yogyakarta, Indonesia, ernawati.sip@gmail.com

Muhammad Syarifudin

Institut Studi Al Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran, Indonesia, muhammadsyarifudin1208@gmail.com

Mukaromah

Institut Studi Al Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran, Indonesia, mukaromahkarom1@gmail.com

Anisa Nuki Amelia

Institut Studi Al Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran, Indonesia, anisanuki@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the reconfiguration of religious authority in the age of artificial intelligence through a comparative analysis of AI Ustadzah in Indonesia and the Buddhist robot Mindar in Japan. It focuses on how non-human entities acquire, negotiate, or encounter the limits of legitimacy as religious communicators, particularly in relation to authenticity, epistemology, religious experience, and accountability. The study employs a qualitative comparative design using documentary research and thematic cross-case analysis of academic literature, institutional documents, media reports, and relevant digital materials. The findings indicate that AI Ustadzah primarily challenges human-based religious authority through simulated identity, epistemic opacity, and the disruption of sanad-based legitimacy, whereas Mindar represents a different configuration centered on embodiment, religious symbolism, institutional recognition, and spiritual experience. The study concludes that AI does not simply replace human religious authority; rather, it reconfigures authority into a hybrid form negotiated among religious traditions, institutions, technologies, platforms, and audiences.

KEYWORDS

artificial intelligence; religious authority; AI Ustadzah; Mindar; digital religion; mediatization

CORRESPONDENCE AUTHOR

saniahfaizatus@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memasuki ruang kehidupan keagamaan dan menghasilkan perubahan penting dalam cara pengetahuan, praktik, dan otoritas agama diproduksi serta dikonsumsi. (Setiawan & Irawan, 2026) Jika pada tahap awal digitalisasi agama teknologi terutama berfungsi sebagai medium untuk memperluas distribusi ceramah, kitab, ritual, dan informasi keagamaan, perkembangan AI generatif menghadirkan situasi yang secara epistemologis lebih kompleks. (Khatimah et al., 2025) AI tidak hanya mendistribusikan pesan yang diproduksi manusia, tetapi juga mampu menghasilkan teks, suara, gambar, video, dan figur virtual yang menyerupai komunikator manusia. (Leliana et al., 2024, p. 236) Perubahan ini menggeser pertanyaan akademik dari sekadar bagaimana agama menggunakan teknologi menuju pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana teknologi generatif mengubah batas antara komunikator manusia, representasi digital, dan otoritas keagamaan? Kajian mutakhir menunjukkan bahwa AI mulai menciptakan bentuk-bentuk baru konten religius, pengalaman spiritual, dan struktur otoritas, sehingga AI tidak lagi memadai dipahami hanya sebagai instrumen komunikasi. (Tarwiyah, 2025)

Persoalan tersebut menjadi semakin signifikan karena otoritas keagamaan pada dasarnya tidak hanya dibangun oleh kemampuan menyampaikan informasi, tetapi juga oleh legitimasi epistemik, integritas moral, pengalaman, institusi, dan pengakuan komunitas. (Yuliani, 2026) Dalam tradisi Islam, misalnya, transmisi pengetahuan melalui isnad menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga kesinambungan dan autentisitas pengetahuan keagamaan. (Ghozali, 2024)

Naskah penelitian ini juga menegaskan bahwa otoritas ulama berkaitan dengan kapasitas keilmuan, integritas moral, serta pengakuan komunitas, bukan sekadar kemampuan berbicara atau menghasilkan pesan keagamaan. Namun, ruang digital telah memperkenalkan mekanisme legitimasi yang berbeda. Visibilitas, jumlah pengikut, engagement, popularitas, dan algoritma platform dapat berperan dalam menentukan siapa yang memperoleh perhatian publik. (Siregar et al., 2025) Studi tentang otoritas keagamaan digital di Indonesia bahkan menunjukkan bahwa otoritas baru semakin dipengaruhi oleh kompetensi digital, visibilitas daring, serta sistem reputasi dan pemeringkatan yang digerakkan algoritma. (Lubis, 2023)

Dalam konteks Indonesia, fenomena munculnya figur Ustadzah AI memperlihatkan bentuk paling eksplisit dari perubahan tersebut. (Febriani, Detik.com; Abdilah, 2025) Figur virtual seperti Ustadzah Hajar menunjukkan bahwa representasi seorang pendakwah dapat direkayasa secara sintetis dan diproduksi untuk berinteraksi dengan audiens melalui platform digital. (Ilyas et al., 2025, p. 200) Penelitian terbaru mengenai ekosistem dakwah berbasis AI di Indonesia bahkan telah mengidentifikasi akun-akun virtual dan konten dakwah sintetis sebagai bagian dari proses mekanisasi otoritas keagamaan serta mempertanyakan kembali relevansi epistemologi isnad ketika pesan keagamaan diproduksi oleh algoritma. (Dermawan, 2026) Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai autentisitas: ketika suara, wajah, gaya komunikasi, dan ekspresi seorang pendakwah dapat dihasilkan oleh mesin, apakah persepsi publik terhadap otoritas masih bergantung pada keberadaan subjek manusia? Dengan demikian, persoalan AI dalam dakwah bukan hanya berkaitan dengan akurasi informasi, tetapi juga dengan siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama agama dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pesan tersebut. (Dermawan, 2026)

Persoalan serupa, tetapi dalam konfigurasi budaya dan epistemologi yang berbeda, dapat ditemukan dalam perkembangan robot Buddhis di Jepang. (Yam et al., 2023, p. 867; Perdana, Kompas.com) Salah satu contoh paling menonjol adalah Mindar, robot berbentuk android yang merepresentasikan Bodhisattva Kannon di Kōdaiji Temple, Kyoto. (Puzio, 2023, p. 1022) Mindar menyampaikan ajaran berdasarkan Heart Sutra dan ditempatkan dalam lingkungan kuil sebagai bagian dari pengalaman keagamaan. (Puzio, 2023, p. 1022) Penelitian antropologis menunjukkan bahwa Mindar dirancang bukan semata-mata sebagai perangkat penyampai informasi, tetapi sebagai teknologi afektif yang berusaha membentuk pengalaman emosional dan pemahaman embodied terhadap ajaran Buddhis. Penelitian lain menunjukkan bahwa interaksi dengan Mindar bahkan dapat dirasakan sebagian pengunjung sebagai pengalaman religius yang memiliki kualitas otoritatif, meskipun pengguna mengetahui bahwa mereka sedang berhadapan dengan mesin. (Baffelli, 2021) Kondisi ini memperlihatkan bahwa otoritas religius tidak selalu bergantung pada status manusiawi komunikator, tetapi dapat muncul melalui relasi antara teknologi, ruang sakral, simbol, institusi, pengalaman, dan persepsi pengguna.

Perbandingan Indonesia dan Jepang menjadi penting karena kedua kasus tersebut menunjukkan dua konfigurasi berbeda mengenai hubungan teknologi dan otoritas agama. Pada kasus Ustadzah AI, persoalan utama terletak pada simulasi figur manusia dan terganggunya rantai epistemik otoritas, sedangkan pada Mindar persoalannya lebih berkaitan dengan embodiment, pengalaman spiritual, dan kemungkinan menghadirkan ajaran melalui entitas nonmanusia. (Balle & Ess, 2020) Dengan demikian, teknologi tidak menghasilkan konsekuensi religius yang seragam. Makna dan legitimasi teknologi dibentuk oleh tradisi epistemologis, struktur institusi, budaya, serta cara komunitas memahami hubungan antara manusia, mesin, dan yang sakral.

Kesenjangan penelitian muncul karena studi tentang agama digital selama ini lebih banyak membahas media sebagai sarana mediasi dan transformasi praktik keagamaan, sementara perkembangan AI generatif menuntut perhatian terhadap kemampuan teknologi untuk mensimulasikan bahkan memproduksi representasi aktor keagamaan. (Qosim & Hamid, 2025) Kajian mengenai *mediatization of religion* menjelaskan bagaimana logika media memengaruhi bentuk dan distribusi otoritas agama, sedangkan perspektif *Digital Religion* memperlihatkan keterkaitan antara teknologi, identitas, praktik, dan komunitas keagamaan. (Najiha, 2025) Namun, kemunculan AI menambahkan dimensi baru: teknologi tidak hanya memediasi otoritas yang sudah ada, tetapi berpotensi menjadi bagian dari proses produksi otoritas itu sendiri. (Tarwiyyah, 2025). Pada titik ini, konsep Baudrillard tentang simulacra dan hyperreality menjadi relevan karena representasi sintetis dapat memperoleh efek autentisitas dan berfungsi secara sosial seolah-olah memiliki referensi nyata.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang AI bukan sebagai pengganti sederhana bagi pemimpin agama, melainkan sebagai *reconfigurer of religious authority*. (Anim et al., 2026; Tarwiyyah, 2025) teknologi yang mengubah mekanisme produksi, distribusi, persepsi, dan legitimasi otoritas keagamaan. Melalui perbandingan Ustadzah AI di Indonesia dan robot Buddhis Mindar di Jepang, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana entitas nonmanusia memperoleh atau gagal memperoleh legitimasi keagamaan, bagaimana otoritas dinegosiasikan antara manusia dan teknologi, serta bagaimana autentisitas, pengalaman religius, dan akuntabilitas mengalami perubahan dalam masyarakat digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian agama dan teknologi, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai masa depan otoritas keagamaan di tengah berkembangnya kecerdasan buatan:

otoritas agama tidak sedang sekadar berpindah dari manusia kepada mesin, melainkan sedang mengalami rekonfigurasi melalui jaringan manusia, institusi, algoritma, platform, dan komunitas pengguna.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif untuk menganalisis rekonfigurasi otoritas keagamaan akibat perkembangan kecerdasan buatan dalam konteks Islam di Indonesia dan Buddhisme di Jepang. Pendekatan komparatif dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan kausal secara statistik, melainkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola kontekstual dalam cara entitas nonmanusia memperoleh, memediasi, dan dinegosiasikan legitimasinya dalam ruang keagamaan. (Indonesia et al., 2023, p. 4) Desain semacam ini relevan dengan penelitian mutakhir mengenai otoritas keagamaan digital yang menempatkan platform, visibilitas algoritmik, legitimasi institusional, dan konteks sosial sebagai unsur yang saling berinteraksi. (Abdilah, 2025)

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan analisis dokumen digital yang secara purposif diarahkan pada dua kasus utama, yaitu fenomena Ustadzah AI di Indonesia (Tarwiyah, 2025) dan robot Buddhis Mindar di Jepang. (Shadiqin et al., 2023, p. 328) Sumber data mencakup artikel ilmiah, publikasi akademik, dokumen institusional, pemberitaan kredibel, serta materi digital yang relevan dengan representasi dan penggunaan kedua entitas tersebut. (Shadiqin et al., 2023, p. 332) Analisis dilakukan secara tematik-komparatif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan perbandingan data berdasarkan beberapa kategori analitis: (1) sumber dan basis legitimasi; (2) bentuk komunikasi keagamaan; (3) representasi dan embodiment; (4) visibilitas dan mediasi algoritmik; (5) respons atau pengakuan komunitas; serta (6) akuntabilitas dan autentisitas keagamaan. Pendekatan analisis kualitatif dan dokumenter semacam ini juga digunakan dalam penelitian komparatif mutakhir mengenai AI dan agama. (Firdaus et al., 2025; Tarwiyah, 2025)

Kerangka interpretasi mengintegrasikan tiga perspektif utama, yaitu *Digital Religion*, *Mediatization of Religion* (Firdaus et al., 2025), dan konsep *Simulacra and Hyperreality*. Ketiganya digunakan secara komplementer untuk menjelaskan bagaimana teknologi tidak hanya menjadi medium penyampaian pesan agama, tetapi turut membentuk aktor, pengalaman, visibilitas, dan mekanisme legitimasi keagamaan. Validitas interpretasi diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari literatur akademik, dokumen institusional, dan sumber digital yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud menentukan apakah AI secara teologis dapat menjadi pemimpin agama, melainkan menjelaskan bagaimana kehadiran AI dan robot religius mengubah mekanisme epistemologis, komunikatif, simbolik, dan sosial yang selama ini membentuk otoritas keagamaan. Pendekatan ini sekaligus menjaga konsistensi dengan metode awal naskah yang menggunakan studi dokumentasi dan analisis tematik komparatif.

PEMBAHASAN

1. AI dan Pergeseran Basis Otoritas Keagamaan: Dari Kredibilitas Personal menuju Visibilitas Algoritmik

Temuan konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan AI dalam komunikasi keagamaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perkembangan teknologi komunikasi, melainkan sebagai perubahan pada mekanisme produksi dan distribusi otoritas keagamaan. Dalam model otoritas keagamaan konvensional, legitimasi umumnya dibangun melalui kombinasi pengetahuan, pengalaman, integritas moral, pengakuan komunitas, dan dalam konteks Islam, kesinambungan transmisi keilmuan melalui isnad. Pendahuluan penelitian ini telah menunjukkan bahwa otoritas ulama dalam tradisi Islam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kapasitas keilmuan, integritas moral, dan pengakuan komunitas. (Syarifudin et al., 2025) Dengan demikian, otoritas tidak identik dengan kemampuan menghasilkan informasi, tetapi berkaitan dengan siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara, dari mana pengetahuan diperoleh, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran yang disampaikan.

Transformasi digital menggeser sebagian mekanisme tersebut. Media sosial memungkinkan otoritas dibentuk melalui visibilitas, engagement, jumlah pengikut, kemampuan membangun kedekatan emosional, dan kompatibilitas dengan logika algoritmik. (Akib et al., 2025) Penelitian terdahulu yang digunakan dalam artikel ini telah menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di ruang digital semakin dipengaruhi oleh kemampuan aktor untuk memperoleh perhatian dan membangun engagement. (Abdilah, 2025) Dalam konteks ini, AI membawa perubahan yang lebih radikal karena bukan hanya manusia yang memperoleh visibilitas melalui algoritma, melainkan representasi nonmanusia juga dapat diproduksi, dioptimalkan, dan didistribusikan secara algoritmik.

Fenomena Ustadzah Hajar di TikTok memperlihatkan secara konkret mekanisme tersebut. Pada Juni 2026, akun yang menampilkan figur "Ustadzah Hajar" dilaporkan telah memperoleh sekitar satu juta pengikut dan lebih dari 1 juta likes, sementara sosok yang ditampilkan ternyata merupakan hasil rekayasa AI. (Febriani, Detik.com; Bösch et al., 2026)

Visual dan suara yang realistis membuat sebagian pengguna pada awalnya mempersepsikannya sebagai pendakwah manusia. Signifikansi fenomena ini bukan terutama terletak pada kemampuan AI menghasilkan video keagamaan, tetapi pada kenyataan bahwa atribut-atribut visual seorang otoritas keagamaan dapat direproduksi tanpa keberadaan subjek manusia yang menjadi sumber otoritas tersebut.

Dengan demikian, terjadi pemisahan antara *authority of the message* (Baffelli & Caple, 2019, p. 18) dan *authority of the messenger* (Ilyas et al., 2025, p. 200). Pesan keagamaan dapat tetap dipandang benar meskipun pembawanya tidak memiliki identitas manusia, pengalaman keagamaan, atau sanad keilmuan. (Pabbajah et al., 2020, p. 6) Namun, justru pada titik inilah problem epistemologis muncul. Jika sebelumnya seseorang dapat menelusuri siapa guru, lembaga, atau tradisi keilmuan yang menjadi sumber sebuah pendapat, pada konten AI rantai tersebut dapat menjadi kabur. (Hidayat et al., 2026) AI mampu menghasilkan bahasa yang secara retorik meyakinkan tanpa memiliki pengalaman belajar agama sebagaimana manusia.

Dalam perspektif epistemologi Islam, kondisi ini menjadi sangat signifikan. Isnad bukan sekadar mekanisme administratif untuk mencatat sumber pengetahuan, melainkan bagian dari mekanisme legitimasi dan autentikasi pengetahuan (Hamdeh, 2024, p. 93; Rakhman et al., 2025). Karena itu, AI dapat menghasilkan teks atau audiovisual yang plausible secara linguistik, tetapi plausibility tidak identik dengan otoritas keilmuan. (Chesterman & Chieh, 2026) Temuan mutakhir mengenai AI dan otoritas keagamaan di Indonesia juga menunjukkan bahwa produksi konten keagamaan sintesis dapat memisahkan ketepatan teknis dari akuntabilitas moral serta menghasilkan bentuk pengetahuan tanpa sanad (*sanad-less knowledge* (Siregar et al., 2025)).

Atas dasar itu, penelitian ini mengusulkan pemahaman bahwa AI tidak serta-merta menggantikan otoritas ulama, tetapi mengubah kondisi sosial di mana otoritas dikenali. Otoritas tidak lagi hanya ditentukan oleh *who knows*, tetapi semakin dipengaruhi oleh *who appears*, *who is visible*, dan *what the algorithm amplifies*. Inilah bentuk pergeseran dari *scholarly authority* menuju *algorithmically mediated authority*.

2. AI Ustadzah dan Problem Simulasi Otoritas dalam Islam Indonesia

Kasus Ustadzah AI di Indonesia dapat dibaca lebih jauh melalui konsep *mediatization of religion* (Anim et al., 2026). Dalam perspektif ini, media bukan sekadar saluran netral bagi agama. (Siregar et al., 2025; Tarwiyah, 2025) Logika media secara aktif memengaruhi bentuk pesan, gaya komunikasi, hubungan antara komunikator dan audiens, serta cara otoritas dibangun. (Hjarvard, 2015, p. 10) Artikel ini sebelumnya telah menempatkan teori *mediatization* sebagai salah satu kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana logika media memengaruhi presentasi agama dan pembentukan otoritas.

TikTok, misalnya, memberikan keuntungan kompetitif kepada konten yang singkat, visual, emosional, mudah dipahami, dan mampu mempertahankan perhatian pengguna (Muzayana, 2023; Suardana & Sain, 2025). Dalam lingkungan semacam itu, kompleksitas keilmuan agama berpotensi mengalami reduksi menjadi pesan-pesan yang lebih sederhana dan mudah dikonsumsi. AI memperkuat proses tersebut karena memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan biaya dan waktu yang relatif rendah. Dengan kata lain, AI bukan hanya mempercepat produksi pesan dakwah, tetapi juga mempercepat proses standarisasi dan replikasi figur keagamaan.

Dalam kasus Ustadzah Hajar, aspek visual memiliki posisi penting. Figur perempuan berhijab, ekspresi wajah, suara lembut, mikrofon, dan setting ceramah membentuk serangkaian tanda yang secara kultural diasosiasikan dengan seorang ustadzah (Aula, 2022, p. 127). Ketika tanda-tanda tersebut diproduksi secara sintesis, publik berhadapan dengan representasi yang memiliki seluruh atribut permukaan seorang pendakwah tetapi tidak memiliki referensi manusia sebagaimana yang diasumsikan oleh tanda tersebut. Di sinilah teori Baudrillard mengenai simulakra menjadi relevan. (Williams, 2005, p. 114)

Simulakra tidak sekadar berarti gambar palsu. Ia menunjuk pada kondisi ketika representasi tidak lagi hanya merepresentasikan realitas, tetapi mulai berfungsi sebagai realitas sosial yang berdiri sendiri. Dalam kasus Ustadzah AI, wajah dan suara bukan lagi sekadar alat untuk menyampaikan pesan dari seorang pendakwah; wajah dan suara itu sendiri menjadi pusat perhatian, membangun kesan kehadiran, kedekatan, dan kredibilitas. Dengan demikian, simulasi kehadiran dapat menghasilkan efek sosial yang sebelumnya dihasilkan oleh kehadiran manusia. (Lombard & Xu, 2021, p. 32)

Namun demikian, penting untuk tidak menyimpulkan bahwa semua konten AI otomatis merupakan *hyperreality*. (Murwonugroho et al., 2025) Status tersebut baru relevan ketika representasi sintesis mulai memperoleh penerimaan sosial sedemikian rupa sehingga batas antara representasi dan realitas menjadi kabur. Kasus Ustadzah Hajar memperlihatkan gejala awal kondisi tersebut karena sebagian audiens mempersepsikan figur sintesis sebagai manusia nyata sebelum identitas artifisialnya diketahui. (Sharma et al., 2025) Media melaporkan bahwa visual yang sangat realistis membuat pengguna mengira figur tersebut merupakan manusia sungguhan.

Dengan demikian, problem utamanya bukan semata-mata "AI berdakwah", melainkan AI memproduksi tanda-tanda otoritas keagamaan yang dapat dikonsumsi tanpa mengetahui asal-usul epistemiknya. Hal ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *epistemic opacity of religious AI*: (Anim et al., 2026; Niam, 2024) pengguna mengetahui pesan, tetapi tidak selalu mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pesan, bagaimana pesan tersebut diproduksi, sumber pengetahuannya, dan mekanisme validasinya.

Menariknya, respons terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tradisional belum sepenuhnya hilang. Kementerian Agama, misalnya, menekankan perlunya sikap kritis dan *tabayyun* serta menegaskan pentingnya bimbingan ulama atau guru yang memiliki rekam jejak keilmuan dan sanad yang dapat dipertanggungjawabkan (Siregar et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kemunculan AI justru memunculkan proses renegosiasi otoritas, bukan sekadar penggantian otoritas manusia dengan mesin.

3. Mindar dan Robot Buddhis Jepang: Ketika Otoritas Tidak Hanya Berbasis Pengetahuan

Berbeda dengan kasus Indonesia, kasus robot Buddhis di Jepang menunjukkan konfigurasi hubungan manusia-teknologi-agama yang secara epistemologis berbeda. (Yam et al., 2023, p. 867) Artikel ini telah menunjukkan bahwa Mindar, robot yang menyerupai Bodhisattva Kannon, digunakan sebagai medium penyampaian ajaran Buddhis dan diposisikan dalam konteks inovasi religius menghadapi perubahan sosial dan berkurangnya tenaga monastik. (Puzio, 2023, p. 1022)

Mindar dikembangkan untuk Kōdaiji Temple di Kyoto dan diperkenalkan kepada publik pada 2019 sebagai representasi Kannon. Robot tersebut dapat bergerak dan berbicara serta menyampaikan ajaran yang didasarkan pada Heart Sutra. (Puzio, 2023, p. 1022) Kajian antropologis mengenai Mindar menunjukkan bahwa para pengembangnya memandang kemampuan robot untuk menyampaikan ajaran tertentu sebagai sesuatu yang memiliki relevansi khusus dalam konteks Buddhisme kontemporer. (Baffelli, 2021; Puzio, 2023, p. 1022)

Perbedaan fundamental dengan kasus Ustadzah AI terletak pada konfigurasi ontologis dan ritualnya. Dalam kasus Ustadzah Hajar, persoalan utama terletak pada simulasi seorang manusia yang ternyata tidak ada. Dalam kasus Mindar, publik sejak awal mengetahui bahwa mereka berhadapan dengan sebuah robot. Dengan demikian, Mindar tidak harus menyembunyikan status nonmanusianya untuk menghasilkan pengalaman religius. Justru status robot tersebut menjadi bagian dari eksperimen religius dan teknologi.

Perbedaan ini penting untuk teori simulacra. Ustadzah AI bekerja terutama melalui *simulation of human religious authority*, (Tarwiyah, 2025) sedangkan Mindar lebih dekat kepada *materialization of a religious persona through technology*. (Balle & Ess, 2020; Fikri et al., 2025) Mindar tidak berusaha menjadi seorang biksu manusia tertentu. Ia direpresentasikan sebagai manifestasi Kannon dan ditempatkan dalam ruang keagamaan yang konkret. Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan semata "apakah robot ini manusia?", melainkan "apakah pengalaman religius yang dimediasi robot dapat dianggap bermakna?"

Kajian mengenai Mindar menunjukkan bahwa respons pengunjung juga tidak seragam. Sebagian pengunjung mengalami respons emosional yang kuat, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kepantasan robot dalam menyampaikan ajaran di kuil. (Baffelli, 2021; Tan et al., 2025, p. 9) Temuan ini memperlihatkan bahwa penerimaan otoritas robot tidak bersifat otomatis. Otoritas merupakan hasil negosiasi antara teknologi, institusi agama, simbol, pengalaman pengguna, dan konteks budaya. (Balle & Ess, 2022)

Dalam konteks Jepang, persoalan ini dapat dipahami melalui konsepsi relasional mengenai manusia, teknologi, dan spiritualitas (McStay, 2021, p. 1785). Literatur yang digunakan dalam artikel menunjukkan adanya kecenderungan dalam konteks Buddhis dan Shinto untuk melihat batas antara manusia, makhluk hidup, objek material, dan realitas spiritual secara lebih cair dibandingkan model ontologis modern Barat yang secara tegas memisahkan manusia dan mesin. Karena itu, teknologi robotik dapat memasuki ruang religius bukan hanya sebagai perangkat teknis, tetapi sebagai bagian dari diskursus mengenai embodiment, relasi, dan pengalaman spiritual.

Namun, temuan ini tidak berarti bahwa Buddhisme Jepang secara umum menerima robot sebagai pemegang otoritas agama. Justru kasus Mindar menunjukkan bahwa penerimaan bersifat kontekstual dan terbatas. Robot dapat menjadi medium, representasi, atau fasilitator pengalaman keagamaan tanpa harus menjadi sumber otoritas doktrinal yang independen. Distingsi ini penting agar penelitian tidak terjebak pada determinisme teknologi.

4. Indonesia dan Jepang: Dua Model Rekonfigurasi Otoritas Keagamaan

Perbandingan kedua kasus menunjukkan bahwa AI dan robotika tidak menghasilkan satu pola universal mengenai perubahan otoritas agama. Sebaliknya, teknologi berinteraksi dengan struktur epistemologis, institusi, budaya, dan sejarah masing-masing tradisi keagamaan.

Tabel 1. Komparasi Utadzah AI di Indonesia dan Robot Buddhis di Jepang

Dimensi	Indonesia: Ustadzah AI	Jepang: Mindar/Robot Buddhis
Basis legitimasi	Pengetahuan, sanad, identitas pendakwah, pengakuan komunitas	Institusi kuil, simbol Kannon, pengalaman ritual
Persoalan utama	Autentisitas dan akuntabilitas	Makna embodiment dan pengalaman religius
Bentuk teknologi	Avatar/figur manusia sintetis	Robot humanoid/representasi religius
Relasi dengan manusia	Mensimulasikan komunikator manusia	Menampilkan entitas religius melalui tubuh robot
Risiko utama	Mis/disinformasi dan hilangnya sanad	Komodifikasi atau mekanisasi pengalaman religius
Pola otoritas	Negosiasi antara otoritas ulama dan algoritma	Negosiasi antara institusi, teknologi, simbol dan pengalaman
Model transformasi	Epistemological disruption	Ontological/experiential experimentation

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak memiliki dampak religius yang bersifat deterministik. Teknologi yang sama dapat menghasilkan konsekuensi berbeda karena beroperasi dalam rezim epistemologi yang berbeda. (Tsuria & Tsuria, 2024) Dalam Islam Indonesia, otoritas keagamaan memiliki keterkaitan kuat dengan transmisi ilmu, guru, sanad, dan legitimasi komunitas. (Siregar et al., 2025) Karena itu, munculnya figur AI menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak untuk berbicara atas nama agama. Sebaliknya, dalam kasus Mindar, masalahnya lebih banyak berkaitan dengan bagaimana tubuh nonmanusia dapat menjadi medium pengalaman dan komunikasi religius. (Shadiqin et al., 2023, p. 329)

Temuan ini memperkuat argumen dalam pendahuluan bahwa interaksi AI dengan agama harus dianalisis secara kontekstual, bukan melalui asumsi bahwa teknologi akan menghasilkan sekularisasi atau penggantian manusia secara otomatis. (Setiawan & Irawan, 2026) AI justru dapat memperkuat agama dalam beberapa konteks sekaligus mengguncang struktur otoritasnya dalam konteks lain.

Dengan demikian, kontribusi penting penelitian ini adalah menggeser pertanyaan dari "apakah AI dapat menjadi ustadz atau biksu?" menuju pertanyaan yang lebih analitis: "kondisi apa yang memungkinkan entitas nonmanusia memperoleh legitimasi sebagai komunikator religius?" Pertanyaan kedua jauh lebih produktif secara akademis karena membuka ruang analisis terhadap institusi, algoritma, pengguna, tradisi, dan struktur epistemologi secara bersamaan.

5. Dari Otoritas Manusia ke Otoritas Hibrida: Reconfiguring Rather than Replacing

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini mengusulkan bahwa masa depan otoritas keagamaan tidak terutama bergerak menuju penghapusan otoritas manusia, tetapi menuju otoritas hibrida (*hybrid religious authority*). (Anim et al., 2026) Otoritas hibrida muncul ketika legitimasi agama dibentuk melalui interaksi antara manusia, institusi, algoritma, platform digital, dan pengguna. (Sulfikar & Yasmine, 2026)

AI tidak menghasilkan pengetahuan keagamaan dalam ruang yang sepenuhnya otonom. Di balik setiap sistem AI terdapat pengembang, dataset, pemrograman, kebijakan platform, pemilik teknologi, dan manusia yang menghasilkan atau memilih materi yang menjadi basis keluaran sistem. Karena itu, menyebut AI sebagai "otoritas" secara literal dapat menyembunyikan struktur sosial yang berada di belakang teknologi. Lebih tepat jika AI dipahami sebagai aktor mediasi yang dapat mengubah distribusi otoritas tanpa sepenuhnya memiliki otoritas tersebut. (Palese, 2026, p. 105)

Dalam konteks Islam Indonesia, model hibrida ini dapat mengambil bentuk hubungan antara ulama, lembaga keagamaan, content creator, platform media sosial, dan AI. AI dapat digunakan untuk menerjemahkan kitab, membuat transkripsi ceramah, menyediakan akses terhadap literatur, membuat materi dakwah, atau memberikan respons awal terhadap pertanyaan keagamaan. (Munahar et al., 2025) Akan tetapi, fungsi tersebut tidak harus identik dengan fatwa atau otoritas keagamaan final. Literatur mutakhir mengenai penggunaan AI dalam ekosistem dakwah Indonesia juga menunjukkan adanya model yang berusaha menggabungkan legitimasi tradisional berbasis isnad dengan optimalisasi digital. (Dermawan, 2026)

Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa pertentangan antara "agama versus teknologi" tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena kontemporer. Yang lebih relevan adalah melihat bagaimana agama mengatur, mengadopsi,

membatasi, dan menegosiasikan teknologi. (Atallah, 2026) AI dapat menjadi instrumen khidmah, tetapi sekaligus dapat menjadi sumber disinformasi. AI dapat memperluas akses terhadap pengetahuan, tetapi sekaligus mengaburkan asal-usul pengetahuan. AI dapat membantu dakwah, tetapi sekaligus menciptakan ilusi kehadiran otoritas. (Marwantika & Dauda, 2025)

Karena itu, masa depan otoritas agama kemungkinan besar tidak akan ditentukan oleh kemampuan teknologi untuk "menggantikan" ulama, melainkan oleh kemampuan komunitas keagamaan untuk membangun mekanisme verifikasi baru. Dalam konteks Islam, *isnad* dan *tabayyun* tetap memiliki relevansi, tetapi penerapannya perlu diperluas ke lingkungan digital. Penelitian terbaru tentang *AI-generated religious disinformation* bahkan menunjukkan bahwa prinsip *isnad* dan *tabayyun* masih relevan, tetapi menghadapi persoalan baru karena asal-usul konten sintetis sering kali tidak mudah dilacak. (Fitria et al., 2025)

6. Implikasi Epistemologis: Memisahkan Kemampuan Komputasional dari Otoritas Moral

Persoalan paling mendasar dari kemunculan AI dalam agama bukanlah apakah mesin dapat menghasilkan jawaban yang benar, melainkan apakah kemampuan menghasilkan jawaban dapat disamakan dengan hak untuk menentukan kebenaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan.

AI dapat memiliki kapasitas komputasional yang jauh lebih besar dibandingkan individu manusia. Ia dapat mengakses dan memproses sejumlah besar informasi, menghasilkan berbagai bentuk teks, dan berkomunikasi secara cepat. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan moral agency. (Formosa et al., 2026, p. 40) Dalam agama, suatu keputusan tidak hanya dinilai berdasarkan konsistensi logis atau kesesuaian informasi, tetapi juga berdasarkan konteks, niat, tanggung jawab, konsekuensi, dan integritas.

Di sinilah perbedaan antara information authority (Adara & Victorynie, 2025, p. 71) dan *religious authority* (Ayubi & Alif, 2023, p. 4) menjadi penting. AI mungkin memiliki informational authority dalam arti mampu memberikan akses terhadap informasi, tetapi hal tersebut tidak identik dengan *normative religious authority*. Seorang ulama bukan hanya seseorang yang mengetahui teks, melainkan seseorang yang memiliki kompetensi interpretatif, pengalaman pedagogis, tanggung jawab moral, dan pengakuan sosial.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika AI menggunakan bahasa interpersonal seperti "saya menyarankan", "menurut ajaran Islam", atau "dalam Buddhisme". Bahasa semacam itu dapat menciptakan persepsi subjektivitas dan intensionalitas, padahal sistem tersebut tidak mengalami kehidupan religius sebagaimana manusia. Dengan demikian, AI berpotensi menciptakan anthropomorphic authority, (Tarwiyyah, 2025) yakni otoritas yang muncul karena mesin dipersepsikan seolah-olah memiliki kualitas personal.

Fenomena Mindar menunjukkan sisi lain dari persoalan tersebut. Di sana, tubuh robot justru menjadi bagian dari eksperimen mengenai bagaimana pengalaman religius dapat dimediasi melalui entitas nonmanusia. Penelitian antropologis mengenai Mindar menunjukkan bahwa pembuatnya secara khusus mempertimbangkan kemampuan robot untuk menyampaikan ajaran tertentu melalui bentuk dan kehadirannya. Artinya, embodiment tidak hilang ketika agama memasuki dunia teknologi; ia justru direkayasa ulang (Cheong, 2020).

Dengan demikian, AI tidak menghapus kebutuhan terhadap embodiment, melainkan mengubah bentuk embodiment. Dalam kasus Ustadzah AI, tubuh sintetis menggantikan tubuh pendakwah. Dalam kasus Mindar, tubuh robot menjadi medium kehadiran religius. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa masa depan komunikasi agama tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan mesin, tetapi juga dengan bagaimana manusia mengonstruksi kehadiran, autentisitas, dan pengalaman spiritual melalui teknologi.

7. Model Konseptual: Otoritas Keagamaan sebagai Proses Negosiasi

Berdasarkan seluruh analisis, penelitian ini dapat merumuskan model konseptual bahwa otoritas keagamaan di era AI dibentuk oleh interaksi setidaknya lima unsur: tradisi keagamaan, institusi, teknologi, platform, dan audiens. Otoritas tidak lagi bergerak secara linear dari ulama kepada umat, tetapi melalui jaringan yang lebih kompleks. (Sulfikar & Yasmine, 2026; Syarifudin et al., 2025)

Dalam model tersebut, tradisi menyediakan sumber legitimasi; institusi menyediakan mekanisme validasi; teknologi menyediakan kemampuan produksi dan distribusi; platform menyediakan algoritma visibilitas; sementara audiens menentukan tingkat penerimaan melalui interaksi, engagement, dan praktik penggunaan. (Akib et al., 2025) AI berada di tengah jaringan tersebut sebagai mediator yang dapat mempercepat, memodifikasi, atau bahkan mengganggu hubungan antareleman. (Gregory et al., 2020, p. 547)

Model ini memungkinkan penelitian memahami mengapa figur AI dapat memperoleh popularitas tanpa memiliki sanad, tetapi belum tentu memperoleh legitimasi institusional. Sebaliknya, robot seperti Mindar dapat memperoleh

legitimasi simbolik karena didukung oleh institusi keagamaan dan ditempatkan dalam ruang ritual, meskipun tetap tidak diterima secara universal sebagai otoritas independen.

Dengan demikian, otoritas keagamaan dalam masyarakat digital dapat dirumuskan sebagai:

$$\text{Religious Authority} = \text{Legitimacy} \times \text{Mediation} \times \text{Visibility} \times \text{Recognition} \times \text{Accountability}$$

Rumus tersebut bukan formula matematis dalam pengertian positivistik, tetapi model analitis. Legitimasi tanpa visibilitas mungkin tidak menghasilkan pengaruh luas; visibilitas tanpa legitimasi menghasilkan popularitas tetapi tidak selalu menghasilkan otoritas; mediasi tanpa akuntabilitas menciptakan risiko; sedangkan pengakuan tanpa mekanisme verifikasi dapat menghasilkan otoritas semu. Karena itu, akuntabilitas menjadi variabel pembeda antara popularitas digital dan otoritas keagamaan yang legitimate.

Kerangka tersebut sekaligus memperluas konsep *mediatization of religion*. (Siregar et al., 2025; Zuhri & Riski, 2026) Jika penelitian sebelumnya banyak melihat bagaimana media mengubah cara agama dikomunikasikan, era AI menuntut pertanyaan tambahan: bagaimana media yang memiliki kapasitas generatif ikut memproduksi subjek yang tampak memiliki otoritas? Di sinilah AI berbeda dari media tradisional. Radio, televisi, dan media sosial pada dasarnya memediasi komunikasi manusia; AI generatif dapat memproduksi representasi komunikator itu sendiri.

8. Sintesis Komparatif: AI sebagai *Reconfigurer of Religious Authority*

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa AI lebih tepat dipahami sebagai *reconfigurer of religious authority* daripada sebagai pengganti otoritas keagamaan. (Anim et al., 2026; Tarwiyyah, 2025a, 2025b) Pada kasus Indonesia, AI mengganggu mekanisme epistemologis tradisional karena memungkinkan terciptanya figur keagamaan tanpa identitas manusia, sanad, pengalaman belajar, dan akuntabilitas moral. (Fitryansyah & Fauziah, 2024) Pada kasus Jepang, robot Buddhis menunjukkan kemungkinan yang berbeda: teknologi dapat menjadi medium embodiment dan pengalaman religius tanpa harus sepenuhnya mengambil alih posisi otoritas institusional. (Tan et al., 2025, p. 9)

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa masa depan otoritas agama akan ditentukan oleh proses negosiasi antara tradition dan innovation. (Lubis, 2023) Tradisi yang sepenuhnya menolak teknologi berisiko kehilangan ruang komunikasi dengan generasi digital; sebaliknya, penerimaan teknologi tanpa mekanisme epistemologis dapat menghasilkan delegitimasi pengetahuan agama. Jalan yang lebih produktif adalah membangun critical technological accommodation, yaitu penerimaan teknologi yang disertai mekanisme verifikasi, transparansi, akuntabilitas, dan literasi digital keagamaan. (Abdilah, 2025)

Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian memperluas kajian *digital religion* dengan menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar medium komunikasi, tetapi dapat menghasilkan simulasi aktor keagamaan. Kedua, penelitian memperluas teori *mediatization of religion* dengan menunjukkan bahwa logika media generatif dapat memengaruhi bukan hanya bentuk pesan, tetapi juga konstruksi komunikator religius. Ketiga, penggunaan konsep simulacra and hyperreality menunjukkan bahwa problem AI dalam agama bukan hanya soal benar atau salahnya informasi, tetapi juga mengenai bagaimana representasi sintetis memperoleh efek autentisitas dan membentuk persepsi publik mengenai siapa atau apa yang layak dipercaya.

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan apakah manusia akan berhenti membutuhkan ulama, kiai, ustadz, pendeta, biksu, atau pemimpin agama lainnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana masyarakat akan membedakan antara pengetahuan yang dapat diakses, pesan yang dapat diproduksi, figur yang dapat disimulasikan, dan otoritas yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah masa depan otoritas keagamaan tidak ditentukan oleh seberapa cerdas AI, tetapi oleh seberapa kuat komunitas keagamaan membangun ekosistem epistemik, etis, dan institusional untuk mengelola kecerdasan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak secara sederhana menggantikan otoritas keagamaan manusia, melainkan merekonfigurasi mekanisme melalui mana otoritas tersebut diproduksi, dimediasi, didistribusikan, dikenali, dan dinegosiasikan. Perbandingan antara fenomena Ustadzah AI di Indonesia dan robot Buddhis Mindar di Jepang memperlihatkan bahwa dampak AI terhadap otoritas keagamaan bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh struktur epistemologis, institusi, tradisi, serta respons komunitas keagamaan. Dalam konteks Islam Indonesia, kehadiran figur AI terutama menghadirkan persoalan epistemologis mengenai autentisitas, kesinambungan sanad, akuntabilitas, dan legitimasi seseorang atau entitas untuk berbicara atas nama agama. Sebaliknya, kasus Mindar menunjukkan konfigurasi yang berbeda, ketika teknologi robotik berfungsi sebagai medium

embodiment dan pengalaman religius yang memperoleh legitimasi terutama melalui keterkaitan dengan institusi, simbol, ruang sakral, dan pengalaman pengguna. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi tidak memiliki konsekuensi religius yang deterministik; makna dan legitimasi teknologi selalu dikonstruksi melalui relasi antara teknologi dan ekosistem sosial-keagamaan tempat teknologi tersebut beroperasi.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya memahami otoritas keagamaan di era AI sebagai bentuk *hybrid religious authority*, yakni otoritas yang terbentuk melalui interaksi dinamis antara tradisi keagamaan, institusi, algoritma, platform digital, teknologi, dan audiens. Dalam konfigurasi tersebut, AI lebih tepat diposisikan sebagai *reconfigurer of religious authority* daripada sebagai pemegang otoritas keagamaan yang otonom. Kemampuan komputasional AI dalam mengakses, memproses, dan menghasilkan informasi tidak dapat disamakan dengan normative *religious authority*, karena otoritas keagamaan juga mensyaratkan kompetensi interpretatif, integritas moral, pengalaman, pengakuan sosial, dan akuntabilitas. Model konseptual penelitian ini memperlihatkan bahwa legitimasi, mediasi, visibilitas, pengakuan, dan akuntabilitas merupakan dimensi yang saling berkelindan dalam pembentukan otoritas keagamaan kontemporer. Oleh sebab itu, visibilitas algoritmik dan popularitas digital tidak dengan sendirinya menghasilkan otoritas yang legitimate; sebaliknya, otoritas yang tidak disertai mekanisme verifikasi dan akuntabilitas berpotensi menghasilkan apa yang dapat dipahami sebagai otoritas semu.

Pada akhirnya, masa depan otoritas keagamaan dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi tidak ditentukan oleh kemampuan AI untuk menggantikan manusia, melainkan oleh kapasitas komunitas keagamaan dan institusi terkait dalam membangun ekosistem epistemik, etis, dan institusional yang mampu mengelola teknologi secara kritis. Dalam konteks ini, prinsip verifikasi, transparansi, akuntabilitas, *tabayyun*, serta mekanisme autentikasi pengetahuan tetap menjadi fondasi penting, tetapi perlu diadaptasikan terhadap karakteristik konten sintesis dan lingkungan algoritmik. Penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi terhadap kajian *Digital Religion* dan *Mediatization of Religion* dengan menunjukkan bahwa AI generatif tidak hanya mengubah cara pesan keagamaan dikomunikasikan, tetapi juga memungkinkan produksi dan simulasi figur yang tampak memiliki otoritas religius. Dengan demikian, pendekatan yang paling konstruktif bukanlah penolakan total maupun penerimaan tanpa kritik terhadap AI, melainkan critical technological accommodation—penerimaan teknologi yang disertai verifikasi epistemik, tanggung jawab etis, transparansi produksi, dan penguatan literasi digital-keagamaan. Dalam perspektif tersebut, tantangan utama bukan terletak pada seberapa cerdas AI dalam menghasilkan pesan agama, tetapi pada kemampuan masyarakat membedakan antara informasi yang dapat diproduksi mesin, representasi yang dapat disimulasikan, dan otoritas keagamaan yang benar-benar memiliki legitimasi serta dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

- Abdilah, M. (2025). Agama dalam Cengkraman Algoritma: Polarisasi Otoritas dan Wacana Keagamaan di Media Sosial Indonesia. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 2(4), 168–175. <https://doi.org/10.70182/jca.v2i4.1350>
- Adara, R. A., & Victorynie, I. (2025). Marginalizing and distracting: Digital technology integration in kurikulum merdeka. *Anaphora: Journal of Language, Literary, and Cultural Studies*, 8(1), 67–77. <https://doi.org/10.30996/anaphora.v8i1.131893>
- Akib, M., Fauziyah, N. N., & Hasanah, I. (2025). DIGITAL AUTHORITY UNDER ALGORITHMIC CONTROL. *TAJID Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(2), 705–738. <https://doi.org/10.30631/tjd.v24i2.5245>
- Anim, S., Khairiyah, N., Muchtar, I. H., & Jakaria, J. (2026). Artificial Intelligence and the Crisis of Religious Authority: A Conceptual Review of Islamic Discourse in the Age of Machine Mediation. *RSF Conference Series Business Management and Social Sciences*, 6(1), 77–84. <https://doi.org/10.31098/bmss.v6i1.1095>
- Atallah, F. A. (2026). Digital Mediation and Fatwa Authority in Contemporary Islam: A Critical Islamic Legal and Media-Theoretical Framework. *Religions*, 17(3), 350. <https://doi.org/10.3390/rel17030350>
- Aula, A. (2022). Religion, Media and Piety Construction: A Study of the Web Series Entitled Ustad Millennial. *DINIKA Academic Journal of Islamic Studies*, 7(1), 99–134. <https://doi.org/10.22515/dinika.v7i1.5177>
- Ayubi, S. A., & Alif, M. (2023). Realizing a New Spiritualism: Development of Religious Authority during the COVID-19 Pandemic through Ngaji Online. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, 62. <https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.62.19>
- Baffelli, E. (2021). The Android and the Fax: Robots, AI and Buddhism in Japan. <https://doi.org/10.30687/978-88-6969-527-8/012>
- Baffelli, E., & Caple, J. (2019). Religious Authority in East Asia: Materiality, Media and Aesthetics. *Research at the University of Copenhagen (University of Copenhagen)*, 78(1), 3–23. <https://asianethnology.org/articles/2168>

- Balle, S., & Ess, C. (2020). Robots in Religious Contexts. In *Frontiers in artificial intelligence and applications*.
<https://doi.org/10.3233/faia200963>
- Balle, S., & Ess, C. (2022). Robots, Ethics, and Digital Religion. In *Oxford University Press eBooks* (pp. 562–579). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197549803.013.27>
- Bösch, M., Degeling, M., Çetin, R. B., Stanusch, N., & Romano, S. (2026). Prompt, Upload, Repeat: How Agentic AI Accounts Flood TikTok with Harmful Content. In *MediArXiv (OSF Preprints)*. Center for Open Science.
<https://osf.io/fue3z>
- Cheong, P. H. (2020). Religion, Robots and Rectitude: Communicative Affordances for Spiritual Knowledge and Community. *Applied Artificial Intelligence*, 34(5), 412–431. <https://doi.org/10.1080/08839514.2020.1723869>
- Chesterman, S., & Chieh, L. H. (2026). Research Integrity and Academic Authority in the Age of Artificial Intelligence: From Discovery to Curation? In *arXiv (Cornell University)*. Cornell University.
<https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.05574>
- Dermawan, H. (2026a). Dakwah di Era Algoritma: Dialektika Etika dan Strategi Adaptasi Komunikasi Penyiaran Islam Berbasis Artificial Intelligence. *Ikhbar Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 112–123.
<https://doi.org/10.65823/ikhbar.11i2.18>
- Dermawan, H. (2026b). Dakwah di Era Algoritma: Dialektika Etika dan Strategi Adaptasi Komunikasi Penyiaran Islam Berbasis Artificial Intelligence. *Ikhbar Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 112–123.
<https://doi.org/10.65823/ikhbar.11i2.15>
- Febriani, Anisa Rizki, “Heboh, Ustazah Viral TikTok dengan 1 Juta Followers Ternyata Buatan AI”,
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8549758/heboh-ustazah-viral-tiktok-dengan-1-juta-followers-ternyata-buatan-ai>
- Fikri, M., Muslim, M., & Yakin, F. A. (2025). Kecerdasan Buatan sebagai Simulakra Pendidikan: Analisis Kritis terhadap Krisis Nilai dan Otoritas Keilmuan Pesantren. *Journal of Islamic Education and Pedagogy*, 2(2), 101–113.
<https://doi.org/10.62097/jiep.v2i02.2440>
- Firdaus, M. A., Syihabuddin, M., & Fuady, Z. (2025). ISLAM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Perspectives from Traditionalist and Modernist Muslim Communities in Indonesia. *MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 49(1), 141.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v49i1.1333>
- Fitria, R. S., Anisah, H. U., Hatami, H., & Fauziannor, A. (2025). The Role of Islamic Values in Addressing Hoaxes and Misinformation in Digital Media: A Systematic Literature Review. *Al-I’lam*, 9(1), 66.
<https://doi.org/10.31764/jail.v9i1.35287>
- Fitryansyah, M. A., & Fauziah, F. N. (2024). Bridging Traditions and Technology: AI in The Interpretation of Nusantara Religious Manuscripts. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 22(2), 317–346. <https://doi.org/10.31291/jlka.v22i2.1247>
- Formosa, P., Hipólito, I., & Montefiore, T. (2026). AI and the Relationship Between Agency, Autonomy, and Moral Patency. In *arXiv (Cornell University)* (pp. 35–50). Cornell University. https://doi.org/10.1007/978-3-032-14537-6_3
- Ghozali, A. M. (2024). A Portrait of the Nineteenth-Century Nusantara Ulema Network in Haramain (Transmission of Shaykh Mahfudz At-Tarmasi’s Tafsir-Hadith in Kifāyat Al-Mustafid). *Al-Dzikra Jurnal Studi Ilmu Al-Qur an Dan Al-Hadits*, 18(2), 189. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v18i2.23839>
- Gregory, R. W., Henfridsson, O., Káganer, E., & Kyriakou, H. (2020). The Role of Artificial Intelligence and Data Network Effects for Creating User Value. *Academy of Management Review*, 46(3), 534–551.
<https://doi.org/10.5465/amr.2019.0178>
- Hamdeh, E. (2024). Shaykh Google as Ḥāfiẓ al-Aṣr: The Internet, Traditional ‘Ulamā’, and Self Learning (2020)*. *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 60–99. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3419>
- Hidayat, A., Fatimah, S., & Fitrisia, A. (2026). Epistemologi Digital: Tantangan Baru Filsafat Pengetahuan di Era Artificial Intelligence. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 5(3), 1664–1669. <https://doi.org/10.58344/locus.v5i3.5239>
- Hjarvard, S. (2015). Mediatization and the changing authority of religion. *Research at the University of Copenhagen (University of Copenhagen)*, 38(1), 8–17. <https://doi.org/10.1177/0163443715615412>
- Ilyas, H., Fatmal, Abd. B., & Ahmad, L. O. I. (2025). Digital Jihad in Qur’anic Perspective: An Islamic Response to the Challenges of Cyberspace in the Age of Artificial Intelligence (AI). *QOF*, 9(2), 189–206.
<https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3091>
- Indonesia, S. A.-A. I., Haris, M. A., Salikin, A. D., Sahrodi, J., Fatimah, S., & Indonesia, I. S. N. C. (2023). Religious Moderation among The Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(1). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-63>

- Khatimah, K., Ramli, F. R., & Kurniati, K. (2025). Regulasi dan Tantangan Pemanfaatan AI dalam Moderasi Beragama. *Majelis*, 2(4), 302–313. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1356>
- Leliana, I., Irhamdhika, G., Haikal, A., Septian, R., & Kusnadi, E. (2024). ETIKA DALAM ERA DEEPFAKE: BAGAIMANA MENJAGA INTEGRITAS KOMUNIKASI. *Jurnal Visi Komunikasi*, 22(2), 234. <https://doi.org/10.22441/visikom.v22i02.24229>
- Lombard, M., & Xu, K. (2021). Social Responses to Media Technologies in the 21st Century: The Media are Social Actors Paradigm. *Human-Machine Communication*, 2, 29–55. <https://doi.org/10.30658/hmc.2.2>
- Lubis, N. (2023). Intersection of Traditional Religious Authority and New Authority in the Digital Space of Indonesia. *FIKRAH*, 11(1), 135. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v11i1.19678>
- Marwantika, A. I., & Dauda, K. O. (2025). Da'wah in the Algorithmic Era: Investigating Bias and Validity of Islamic Artificial Intelligence Applications. *MUHARRIK Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v8i2.7730>
- McStay, A. (2021). Emotional AI, Ethics, and Japanese Spice: Contributing Community, Wholeness, Sincerity, and Heart. *Philosophy & Technology*, 34(4), 1781–1802. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00487-y>
- Munahar, M., Nuruzzaman, Moh. A., Roa'zah, N. R., Muazaroh, M. D., Afifah, D. E., Sukirno, S., Supeno, S., & Laila, N. H. N. (2025). INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE STRATEGY, ETHICS, AND EFFECTIVENESS OF CONTEMPORARY DAWAH. *West Science Islamic Studies*, 3(2), 153–160. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i02.2489>
- Murwonugroho, W., Ariani, Nithipattaraahnan, S., & Budiwaspada, A. E. (2025). Artificial Intelligence, Escapism, and the Rise of Synthetic Reality: How technology reshapes human perception. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 10, 9–19. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10isi39.7669>
- Muzayana, M. (2023). TikTok, Digital Da'wa and Religious Authorities. *Journal of Islamic Communication and Counseling*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.18196/jicc.v2i1.24>
- Najiha, R. (2025). Agama dan Kemajuan Teknologi Digital: Digital Religion dan Media Sosial. *Mozaic.*, 4(2). <https://doi.org/10.35719/mozaic.v4i02.2299>
- Niam, M. F. (2024). Does Artificial Intelligence Go beyond the Limits of Religious Authority? An Ethical Review on IslamGPT. *Al Adalah*, 27(1), 71–84. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v27i1.477>
- Pabbajah, M., Jubba, H., Widyanti, R. N., Pabbajah, T. H., & Iribaram, S. (2020). Internet of Religion: Islam and New Media Construction of Religious Movements in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291750>
- Palese, R. (2026). Artificial Truth: Algorithmic Power, Epistemic Authority, and the Crisis of Democratic Knowledge. *Societies*, 16(3), 102. <https://doi.org/10.3390/soc16030102>
- Perdana, Agni Vidya, Robot Biksu, Cara Kuil Buddha Berusia 400 Tahun di Jepang Gaet Kaum Muda, https://internasional.kompas.com/read/2019/08/20/11222561/robot-biksu-cara-kuil-buddha-berusia-400-tahun-di-jepang-gaet-kaum-muda?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook (akses, 25/07/2026)
- Puzio, A. (2023). Robot, let us pray! Can and should robots have religious functions? An ethical exploration of religious robots. *AI & Society*, 40(2), 1019–1035. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01812-z>
- Qosim, N., & Hamid, A. (2025). Tuhan dalam Genggaman: Transformasi Pengalaman Spiritual dan Praktis Keagamaan di Era Kecerdasan Buatan (AI). *SETYAKI Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 3(4), 38–52. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v3i4.2452>
- Rakhman, A. B., Zain, L., & Muthi'ah, A. (2025). Digital Isnād System and Religious Legitimacy: Examining The Qualification and Authorization Process of Islamic Authority on Cariustadz.ID Platform. *Mashdar Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 7(1), 301–320. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v7i1.11108>
- Setiawan, H., & Irawan, Y. (2026). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/ AI) dan Agama dalam Kehidupan Manusia. *Mitra Sriwijaya Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 6(2), 287–308. <https://doi.org/10.46974/ms.v6i2.167>
- Shadiqin, S. I., Fuadi, T. M., & Ikramatoun, S. (2023). AI dan Agama: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(2), 319–333. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.12408>
- Sharma, A., Pujari, M., & Goel, A. (2025). The Rise of AI-Generated Synthetic Identities: A New Frontier in Social Media. *International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences*, 13(2). <https://doi.org/10.37082/ijirms.v13.i2.232397>
- Siregar, K. T., Zhakykazy, I., & Uyuni, B. (2025). Indonesian Muballigh and Religious Authority: From Sanad to Algorithmic Transformation of Islamic Knowledge Transmission in the Digital Era. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 15(2), 298–314. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.47052>

- Suardana, I. K. P., & Sain, Z. H. (2025). When Ritual Meets the Feed: TikTok, Mediatization, and the Reconfiguration of Hindu Religious Authority. *Khazanah Theologia*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.15575/kt.v7i1.47245>
- Sulfikar, A., & Yasmine, D. I. (2026). PLATFORMIZED RELIGIOUS AUTHORITY: Rethinking Legitimacy in the Age of Social Media Influencers. *Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 20(2), 141–171. <https://doi.org/10.21274/epis.2025.20.02.141-171>
- Syarifudin, S., Kudrotulloh, A., & Romadan, A. I. (2025). Authority and Knowledge in Islamic Intellectual Tradition: A Critical Inquiry into Epistemic Legitimacy in the Age of Information Overload. *Harmony Philosophy International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia*, 2(3), 23–34. <https://doi.org/10.70062/harmonyphilosophy.v2i3.330>
- Tan, T. C. Y., Gray, K., Jackson, J. C., Shariff, A., & Yam, K. C. (2025). Cultural Differences in People's Reactions and Applications of Robots, Algorithms, and Artificial Intelligence. *UNC Libraries*. <https://doi.org/10.17615/6sn4-1e32>
- Tarwiyah, H. L. (2025a). Kiai-AI: Renegotiating Religious Authority in the Digital Age. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 106–126. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.106-126>
- Tarwiyah, H. L. (2025b). Artificial Intelligence and Bias in Religious Authority. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 38–46. <https://doi.org/10.60083/jidt.vi0.626>
- Tsuria, R., & Tsuria, Y. (2024). Artificial Intelligence's Understanding of Religion: Investigating the Moralistic Approaches Presented by Generative Artificial Intelligence Tools. *Religions*, 15(3), 375. <https://doi.org/10.3390/rel15030375>
- Williams, R. W. (2005). Politics and Self in the Age of Digital (Re)producibility. *Fast Capitalism*, 1(1), 104–121. <https://doi.org/10.32855/fcapital.200501.008>
- Yam, K. C., Tan, T. C. Y., Jackson, J. C., Shariff, A., & Gray, K. (2023). Cultural Differences in People's Reactions and Applications of Robots, Algorithms, and Artificial Intelligence. *Management and Organization Review*, 19(5), 859–875. <https://doi.org/10.1017/mor.2023.21>
- Yuliani, N. M. (2026). Relasi Agama dan Media Digital Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Komunikasi Virtual. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 10(1), 104–116. <https://doi.org/10.37329/jpah.v10i1.4942>
- Zuhri, S. I., & Riski, J. W. S. (2026). Like, Share, Follow dan Otoritas Keagamaan Digital: Tinjauan Konseptual Tentang Mediatisasi Agama di Kalangan Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 3457–3466. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36609>